



# RENCANA KERJA 2023

*RENCANA  
KERJA*

***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
KABUPATEN BANGKA***





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Diponegoro Nomor 3 dan 5 Sungailiat  
Kode Pos 33215 – Telepon (0717) 92251 Faks : (0717) 92561  
E-mail : [dinpemdes.bangka@gmail.com](mailto:dinpemdes.bangka@gmail.com) Website :  
<http://www.dinpemdes.bangka.go.id>

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGKA  
NOMOR :188.45/ /DINPEMDES/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGKA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023;
- c. Bahwa nama Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4448);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomr 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nommor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2000);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2000 Nmor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menetri Dalam Negri Nomr 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Bupati Bnangka Nomor 46A Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021;
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2022

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas untuk :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2023;
- b. Menyusun Rancangan Awal RENJA, Rancangan RENJA dan Rancangan Akhir RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka;
- c. Melaksanakan penyelarasan program dan Kegiatan dengan komponen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka;
- d. Menetapkan target indikator kinerja program Tahun 2023 dan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Desember 2021

**KEPALA DINAS,**

**Drs. M. DALYAN AMRIE  
NIP. 19670427 198603 1 002**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN DESA KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR : 188.45/ /DINPEMDES/2021**  
**TANGGAL : Desember 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2022**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi
		Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa
		Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa
4	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
5	Anggota	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna
		Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa
		Kepala Seksi Partisipasi Budaya Masyarakat Dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
		Kepala Seksi Fasilitasi Keuangan Desa
		Kepala Seksi Fasilitasi Aset Desa
		Kepala Seksi Pengadaan Barang/Jasa Desa
		Kepala Seksi Fasilitasi Adaministrasi Desa
		Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa
		Kepala Seksi Fasilitasi Penataan Desa

**KEPALA DINAS,**

**Drs. M. DALYAN AMRIE**  
**NIP. 19670427 198603 1 002**

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka tahun 2023 dapat diselesaikan .

Rencana Kerja ini disusun dalam memberikan acuan dalam menjalankan urusan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen Rencana Kerja diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.

Rencana Kerja ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan dalam penyajiannya maupun penyusunannya, oleh karena itu saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu dalam membuka wawasan sehingga pada saatnya akan dapat memperbaiki kinerja serta penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sungailiat, Agustus 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Bangka,

Drs. M. DALYAN AMRIE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670427 198603 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I    PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 1
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 4
1.4 Sistematika Penulisan	I - 5
BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	II - 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II - 1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	II – 16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 17
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 40
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III - 2
3.3 Program dan Kegiatan	III - 3
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SERTA PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	IV - 1
BAB V    PENUTUP	V - 1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka. Renstra Dinas Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2023 merupakan pedoman untuk menyusun Renja yang kemudian menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2023.

### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);

25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);

26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 ini adalah:

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas .
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra 2019-2023 dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
3. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 ini adalah sebagai:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja serta RKA-PD Tahun 2023;
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
4. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
6. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu tahun anggaran .

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
  
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
  - 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
  - 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi PD
  - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
  
3. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM
  - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 3.3 Program dan Kegiatan
  
4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  
5. BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu dan Capaian Renstra Skpd**

Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka tahun 2021 dan pencapaian kinerja Renstra Dinpempdes ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja (tahun 2021) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka.

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Penilaian kinerja program/kegiatan sebagai substansi pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka.

Penilaian kinerja program/kegiatan dilakukan dengan membandingkan capaian akumulasi kinerja program/kegiatan pada indikator kinerja program/kegiatan terhadap sasaran/target program/kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka yang telah ditetapkan sebelumnya.

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2021 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tahun 2021

Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa

kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bangka yang tidak mencapai target realisasi kerja. Hal ini dikarenakan dengan adanya beberapa kegiatan yang terdampak akibat adanya wabah virus *covid-19* yang terjadi di dunia.

Adapun capaian Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dan pencapaian Renstra secara rinci sebagaimana tercantum pada table berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA									
		Persentase Desa Berkriteria Baik								
2.13.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	100%	N/A	100%	100%	100	100%	200%	2
2.13.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang batasnya ditetapkan	2 Desa	N/A	10 Desa	10 Desa	100	2 Desa	12 Desa	6
		Jumlah Desa/Lingkungan yang dimekarkan	2 Desa	N/A	4 Desa	4 Desa	100	-	4 Desa	2

2.13.02.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Tertata Wilayahnya	-	-	-	-	-	2 Desa	2 Desa	-
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>									
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	100%		100%	50%	50	50%	100%	1
2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel	100%	N/A	100%	100%	100	100%	200%	2
		Persentase Laporan Aset Desa yang Akuntabel	50%		50%	50%	100	50%	100%	2
		Persentase Desa yang melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sesuai Ketentuan	100%		100%	100%	100	100%	200%	2
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa dan BPD	100%		100%	100%	100	100%	200%	2
		Persentase peserta bimbingan dan Pelatihan Aparatur desa yang bernilai baik	50%		100%	100%	100	50%	150%	3
		Persentase Desa yang didampingi Sarjana Membangun Desa	100%		100%	100%	100	100%	200%	2

		<b>Persentase Desa/ Kelurahan yang telah mengentry profil secara lengkap dan up to date</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>2</b>
2.13.04.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Jumlah juklak dan juknis pengelolaan keuangan desa	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	2
2.13.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti bimbingan	62 Orang	N/A	62 Orang	-	-	60 Orang	60 Orang	0,96
2.13.04.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	62 Desa	N/A	62 Desa	62 Desa	100	62 Desa	124 Desa	2
2.13.04.2.01.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Sosialisasi Pilkades	-	N/A	9 Desa	-	-	44 Desa	44 Desa	-
2.13.04.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyusun profil desa/kelurahan	62 Desa/19 Kelurahan	N/A	62 Desa/19 Kelurahan	-	-	62 Desa/19 Kelurahan	62 Desa/19 Kelurahan	1
2.13.04.2.01.13	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dibina pengelolaan asetnya	31 Desa	N/A	62 Desa	62 Desa	100	31 Desa	93 Desa	3
2.13.04.2.01.14	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang dibina	62 Orang	N/A	-	-	-	44 Orang	44 Orang	0,70

2.13.04.2.01.18	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Terbaik	8 Desa/Kelurahan	N/A	8 Desa/Kelurahan	8 Desa/Kelurahan	100	8 Desa/Kelurahan	16 Desa/Kelurahan	2
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>									
		Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	100%		N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh Masyarakat	100%	N/A	100%	100%	100	100%	200%	2
		Persentase Sarjana Membangun Desa yang aktif	100%		100%	100%	100	100%	200%	2
		Persentase Kelembagaan Masyarakat yang dibina	100%		100%	100%	100	100%	200%	2
		Persentase PKK Desa/Kelurahan yang aktif	100%		100%	100%	100	100%	200%	2
		Persentase BUMDesa yang aktif	100%		100%	100%	100	100%	200%	2
		Jumlah Desa yang memiliki unit Usaha Bersama	62 Desa		62 Desa	62 Desa	100	62 Desa	124 Desa	2

2.13.05.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	62 Desa	N/A	1 Desa	1 Desa	100	62 Desa	63 Desa	1,01
2.13.05.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarjana Membangun Desa (SMD)	62 Orang	N/A	62 Orang	62 Orang	100	62 Orang	124 Orang	2
2.13.05.2.01.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pembinaan Unit Usaha Bersama	62 BumDesa	N/A	62 BumDesa	62 BumDesa	100	62 BumDesa	124 BumDesa	2
2.13.05.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG (Teknologi Tepat Guna) yang dilombakan	3 Kali	N/A	3 Kali	1 Kali	33	3 Kali	4 Kali	1,33
2.13.05.2.01.07	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat)	-	N/A	-	-	-	-	-	-

2.13.05.2.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan PKK Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	62 Desa, 19 Kelurahan	N/A	62 Desa, 19 Kelurahan	62 Desa, 19 Kelurahan	100	62 Desa, 19 Kelurahan	124 Desa, 38 Kelurahan	2 Desa, 2 Kelurahan
		<b>Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>28,15</b>	N/A	<b>27</b>	<b>27,73</b>	<b>100</b>	<b>27,8</b>	<b>55,53</b>	<b>2</b>
		<b>Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>11,5</b>	N/A	<b>10,15</b>	<b>10,15</b>	<b>100</b>	<b>11,3</b>	<b>21,45</b>	<b>2</b>
2.13.01.2.01	<b>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	N/A	100%	100%	100	100%	200%	2
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	N/A	100%	100%	100	100%	200%	2
2.13.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	7 Dokumen	N/A	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	14 Dokumen	2
2.13.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	20 Dokumen	N/A	20 Dokumen	16 Dokumen	80	20 Dokumen	36 Dokumen	1,8
		<b>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI</b>	<b>0%</b>	N/A	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>

2.13.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	N/A	100%	100%	100	100%	200%	2
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%	N/A	100%	100%	100	100%	200%	2
2.13.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	12 Bulan	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	2
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	14 Dokumen	2
		Indeks Profesionalisme Aparatur	65,33	N/A	63,00	64,83	100	65,00	129,83	2
2.13.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	10%	N/A	10%	0%	-	10%	10%	1,00
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		100%	100%	100	100%	200%	2

		<b>Persentase aparatur yang berkinerja baik</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>2</b>
2.13.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	57 Stel	N/A	57 Stel	-	-	57 Stel	57 Stel	1
		Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	16 Stel		16 Stel	-	-	16 Stel	16 Stel	1
2.13.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang (3 Laki-Laki dan 2 Perempuan)	N/A	5 Orang (3 Laki-Laki dan 2 Perempuan)	-	-	5 Orang (3 Laki-Laki dan 2 Perempuan)	5 Orang (3 Laki-Laki dan 2 Perempuan)	1
		<b>Indeks Sarana dan Prasarana</b>	<b>100</b>	N/A	<b>100</b>	<b>50</b>	50	<b>100</b>	<b>150</b>	2
		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>0,80</b>	N/A	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	100	<b>0,70</b>	<b>1,10</b>	1
2.13.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50,00</b>	<b>100%</b>	<b>150%</b>	<b>2,00</b>

2.13.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani	12 Bulan	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	2
		Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman kantor yang tertangani	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	2
2.13.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>150%</b>	<b>2</b>
2.13.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	N/A	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1 Paket	N/A	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	2
2.13.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>2</b>
		<b>Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>N/A</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>100</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>6 Layanan</b>	<b>2</b>

2.13.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	12 Bulan	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	2
2.13.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	2
2.13.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	N/A	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	2
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>140%</b>	<b>1,4</b>
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara	4 Unit mobil, 4 unit motor	N/A	4 Unit mobil, 4 unit motor	4 Unit mobil, 4 unit motor	100	4 Unit mobil, 4 unit motor	8 Unit mobil, 8 unit motor	2 Unit mobil, 2 unit motor
2.13.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	N/A	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	2
2.13.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	N/A	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	2

## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan DPMD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinpempdes berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan DPMD bahwa ada 2 buah yang menjadi indikator yang dikaji yaitu:

NO	SASARAN /INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa  Indikator: Persentase Desa Kategori Cepat Berkembang	Tidak	Tidak	51,50	56,45	67,75	72,58	51,62	56,50	67,75	72,58	-
2	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah  Indikator: Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	Tidak	Tidak	27,60	27,80	28,15	28,30	27,73	27,80	28,15	28,30	-

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2019 merupakan gambaran Kinerja Tahun Pertama untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun (2019-2023), namun dikarenakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka masih bergabung dengan Dinas Sosial Kabupaten Bangkat maka kinerja pada tahun 2019 belum diketahui, sehingga pencapaian kinerja baru dapat diketahui pada tahun 2020. Rumusan Tujuan Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyesuaian dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil Renstra Dipemdes Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Sasaran pertama ialah Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa Kategori Cepat Berkembang. Desa cepat berkembang sebagai acuan keberhasilan kinerja tiap tahunnya berdasarkan penilaian langsung dari Pemerintah Pusat jumlah desa yang dianggap sudah mampu berkembang dengan cepat sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kemudian sasaran kedua ialah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30). Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamartkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Adapun target maupun realisasi untuk nilai akip dipemdes diharapkan dapat terus terjadi kenaikan sebagaimana tabel yang telah disajikan yaitu pada tahun 2020 dengan target 27,60 terus naik sampai pada tahun 2023 sebesar 28,30.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dengan adanya Program Kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka maka dampaknya terhadap kinerja pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bangka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya perkembangan kelembagaan perekonomian masyarakat secara bertahap.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun baik dari kegiatan gotong royong maupun berupa bantuan fisik/ material sehingga swadaya masyarakat lebih baik dan

meningkat dari tahun sebelumnya.

3. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan akses sumber daya baik secara fisik maupun non fisik.

4. Terpenuhiya fasilitasi untuk kelancaran aktifitas perekonomian di desa.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ini, masih ditemui permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia masih belum memadai.

2. Sarana dan Prasarana belum memadai.

3. Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan Kelembagaan di Pemerintahan Desa dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.

4. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan yang ada.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini akan berdampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah dan menghadapi isu strategis nasional. Isu strategis nasional yang terkait pada urusan pemberdayaan masyarakat adalah upaya percepatan penanganan stunting. Pencapaian visi dan misi kepala daerah Visi dari Kabupaten Bangka adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka yang SETARA (Bangka Sejahtera dan Mulia). Sedangkan Misi Kabupaten Bangka adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Berbasis Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berintegritas
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah
4. Mewujudkan Gerbang Kota Dan Pariwisata Berskala Internasional
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan

Berdasarkan pemetaan visi misi rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang menjadi urusan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka terkait dengan misi yang ke lima (5) adalah Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan. Program/ kegiatan/ subkegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 adalah program-program yang dapat mengatasi dan meminimlisir permasalahan yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Serta program yang dapat mendorong percepatan pencapaian target kinerja sesuai visi misi kepala daerah dan isu strategis nasional.

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus menghadapi tantangan dan hambatan, diantaranya :

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan supaya didukung dengan pendanaan yang memadai sesuai Renja yang diajukan setiap tahunnya dari OPD, agar tidak terjadi pemotongan anggaran Program/Kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan disarankan atau diharapkan untuk mendukung pelaksanaan ke lapangan didukung oleh personil yang memadai sesuai dengan bidang teknis yang dibutuhkan.

3. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka hendaknya didukung oleh kantor/gedung yang memadai.

Sedangkan peluang yang dimiliki dan diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik dan lancar peninjauan lapangan terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat yang memerlukan koordinasi di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

2. Adanya/terselenggaranya forum komunikasi dalam bentuk rapat-rapat dalam memberikan dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada dengan cara pendekatan dan koordinasi sehingga peran serta instansi vertikal dapat memberikan masukan yang berarti bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, Kecamatan maupun di Desa-/Kelurahan.

3. Motor penggerak program/kegiatan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di kabupaten dan Motivator bagi pelaksanaan prosedur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kewenangan.

4. Dana yang tersedia.

5. Sambutan yang baik dan kooperatif dari stakeholder.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.

2. Belum optimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

3. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam Pembangunan Desa.

4. Belum Optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan Ekonomi di Desa.

5. Belum Optimal penyelenggaraan lomba-lomba pembangunan sosial ekonomi Desa.

6. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan Desa/Kelurahan dan kelembagaan lainnya yang ada di desa.

7. Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di desa.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses yang dilakukan dalam melakukan review terhadap rancangan awal RKPD adalah dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Pada rancangan awal RKPD, DPMD mempunyai 4 program dengan menerapkan prinsip mandiri dimana target capaian dan pagu indikatifnya sama dengan hasil analisis kebutuhan. Proses tersebut perlu dilakukan agar Rancangan Awal RKPD sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah. Perubahan rancangan awal RKPD dilakukan dikarenakan adanya pemetaan dari KEPMEN 050-3708 Tahun 2020 menjadi KEPMEN 050-5889 Tahun 2021

**TABEL T-C.31.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.178.742.418,00				5.299.992.040,00
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		28,15				28,30	
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		11,50				13,00	
2.13.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Kab. Bangka	100%	94.485.465,00			100%	43.136.000,00
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%				100%	

2.13.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Kab. Bangka	6 Dokumen	38.393.500,00	Dana Alokasi Umum	P1	6 Dokumen	7.740.500,00
2.13.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka	5 Dokumen	13.754.335,00	Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	6.230.000,00
2.13.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen	6.952.650,00	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	4.420.000,00
2.13.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen	7.187.160,00	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.175.000,00
2.13.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen	7.043.345,00	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	4.225.000,00
2.13.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	4 Laporan	7.388.100,00	Dana Alokasi Umum		4 Laporan	7.913.500,00
2.13.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	8 Laporan	13.766.375,00	Dana Alokasi Umum		8 Laporan	7.432.000,00
		<b>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI</b>		<b>0%</b>				<b>0%</b>	

2.13.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Kab. Bangka	100%	3.718.812.495,00			100%	4.384.415.240,00
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar		100%				100%	
2.13.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	26 Orang/bulan	3.606.598.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	26 Orang/bulan	4.288.335.240,00
2.13.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	12 Dokumen	56.834.280,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	37.360.000,00
2.13.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka	2 Laporan	21.843.800,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Laporan	29.360.000,00
2.13.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka	40 Laporan	33.536.415,00	Dana Alokasi Umum	P1	40 Laporan	29.360.000,00
		<b>Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah</b>		<b>65,33</b>				<b>65,53</b>	
2.13.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	Kab. Bangka	10%	99.336.240,00			10%	122.610.000,00

		<b>Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
		<b>Persentase aparatur yang berkinerja baik</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
2.13.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	1 Paket	9.800.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Paket	46.750.000,00
2.13.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka dan Luar Daerah	11 Dokumen	89.536.240,00	Dana Alokasi Umum	P1	11 Dokumen	34.360.000,00
2.13.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bangka dan Luar Daerah	5 Orang	-	Dana Alokasi Umum	P1	5 Orang	41.500.000,00
		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>		<b>0,80</b>				<b>1,00</b>	
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100%</b>	<b>356.121.838,00</b>			<b>100%</b>	<b>154.407.500,00</b>
		<b>Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi</b>		<b>3 Layanan</b>				<b>3 Layanan</b>	
2.13.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Laporan	240.090.184,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	86.687.500,00

2.13.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Dokumen	86.183.724,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	33.360.000,00
2.13.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Dokumen	29.847.930,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	34.360.000,00
		<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100%</b>	<b>662.809.240,00</b>			<b>100%</b>	<b>390.805.000,00</b>
2.13.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	12 Laporan	475.775.385,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	198.640.000,00
2.13.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	79.059.765,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	133.190.000,00
2.13.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	107.974.090,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	58.975.000,00
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100%</b>	<b>247.177.140,00</b>			<b>100%</b>	<b>204.618.300,00</b>
2.13.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangka	8 Unit	200.807.140,00	Dana Alokasi Umum	P1	8 Unit	128.618.300,00

2.13.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bangka	22 Unit	30.920.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	22 Unit	37.000.000,00
2.13.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangka	1 Unit	15.450.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Unit	39.000.000,00
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>				<b>139.349.350,00</b>				<b>184.736.959,00</b>
		<b>Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi yang baik</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang tertata dengan Baik</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100%</b>	<b>139.349.350,00</b>			<b>100%</b>	<b>184.736.959,00</b>
2.13.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Bangka	4 Desa	107.350.010,00	Dana Alokasi Umum	P1	4 Desa	127.354.248,00
2.13.02.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kab. Bangka	2 Desa	31.999.340,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Desa	57.382.711,00
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>1.788.557.088,00</b>				<b>1.273.462.383,00</b>
		<b>Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100%</b>	<b>1.788.557.088,00</b>			<b>100%</b>	<b>1.273.462.383,00</b>

		<b>Persentase Laporan Aset Desa yang Akuntabel</b>		<b>50,00%</b>				<b>50,00%</b>	
		<b>Persentase Desa yang melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sesuai Ketentuan</b>		<b>100%</b>				<b>100,00%</b>	
		<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa dan BPD</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
		<b>Persentase peserta bimbingan dan Pelatihan Aparatur desa yang bernilai baik</b>		<b>50,00%</b>				<b>100%</b>	
		<b>Persentase Desa/ Kelurahan yang telah mengentry profil secara lengkap dan up to date</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
2.13.04.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Bangka	2 Dokumen	1.290.680.998,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen	270.000.000,00
2.13.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Bangka	62 Orang	24.989.295,00	Dana Alokasi Umum	P1	62 Orang	182.892.000,00
2.13.04.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Bangka	62 Dokumen	58.882.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	62 Dokumen	170.000.000,00

2.13.04.2.01.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Bangka	18 Laporan	214.317.140,00	Dana Alokasi Umum	P1	18 Laporan	230.000.000,00
2.13.04.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kab. Bangka	81 Dokumen	19.998.790,00	Dana Alokasi Umum	P1	81 Dokumen	69.235.700,00
2.13.04.2.01.13	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Kab. Bangka	31 Dokumen	57.688.865,00	Dana Alokasi Umum	P1	31 Dokumen	87.005.630,00
2.13.04.2.01.14	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Bangka	62 Orang	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	62 Orang	127.707.053,00
2.13.04.2.01.18	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Bangka	8 Dokumen	72.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	8 Dokumen	136.622.000,00
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>				<b>3.081.135.644,00</b>				<b>4.611.593.207,00</b>
		<b>Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat</b>	<b>Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh Masyarakat</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100%</b>	<b>3.081.135.644,00</b>			<b>100%</b>	<b>4.611.593.207,00</b>
		<b>Persentase Sarjana Membangun Desa yang aktif</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	

	<b>Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kelembagaan Masyarakat yang dibina</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
		<b>Persentase PKK Desa/Kelurahan yang aktif</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
		<b>Persentase BUMDesa yang aktif</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
		<b>Jumlah Desa yang memiliki unit Usaha Bersama</b>		<b>62 Desa</b>				<b>62 Desa</b>	
2.13.05.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bangka	62 Dokumen	36.628.580,00	Dana Alokasi Umum	P1	62 Dokumen	110.186.800,00
2.13.05.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bangka	1 Lembaga	2.019.740.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Lembaga	2.141.821.305,00

2.13.05.2.01.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Bangka	62 Dokumen	144.314.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	62 Dokumen	196.473.972,00
2.13.05.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Bangka	3 Laporan	80.453.064,00	Dana Alokasi Umum	P1	3 Kali	155.674.820,00
2.13.05.2.01.07	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Bangka	1 Laporan	-	Dana Alokasi Umum	P1	1 Laporan	141.654.000,00
2.13.05.2.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bangka	81 Dokumen	800.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	81 Dokumen	1.865.782.310,00
<b>JUMLAH</b>					<b>10.187.784.500,00</b>				<b>11.369.784.589,00</b>

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020, maka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinpempdes Tahun 2023 mengalami penyesuaian dengan perkembangan tersebut. Penyesuaian dilakukan melalui :

1. Pemetaan ulang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2. Penyesuaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan pada Rancangan Awal Renja Dinpempdes 2023 dengan indikator kinerja Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021

Secara rinci pemetaan ulang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Rancangan Awal Rencana Kerja Dinpempdes Tahun 2023 terhadap Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 disajikan pada Tabel berikut :

KEPMEN : 050-3708 TAHUN 2020		KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021		
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja
2	3	7	8	9
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>PERENCANAAN</b>		<b>PERENCANAAN</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		28,30	
	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		13,00	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%	

<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>6 Dokumen : Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja, Dokumen Renstra, Perkin, Perkin Perubahan, Rencana Aksi)</i>
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>5 Dokumen (1 Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ( Notulen Rapat, GAP dan GBS, Analisis Resiko dan TOR RKA))</i>
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Notulen Rapat))</i>
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>2 Dokumen (1 Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Notulen Rapat))</i>
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Notulen Rapat))</i>

<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah laporan kinerja yang disusun</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>4 Dokumen (1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 1 Dokumen Laporan Tahunan Perangkat Daerah, 1 Dokumen LKPJ Perangkat Daerah, 1 Dokumen LPPD)</i>
		<i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>8 Dokumen (4 Dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah, 4 Dokumen Evaluasi Rencana Aksi)</i>
	<b>Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI</b>		<b>0%</b>	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>31 Orang (17 Laki-laki dan 14 Perempuan)</i>
	<i>Jumlah Laporan Keuangan yang disusun</i>			
		<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>

		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>2 Dokumen (1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Notulen Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun)</i>
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD</i>	<i>40 Dokumen (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 1 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran)</i>
	<b>Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah</b>		<b>65,53</b>	
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi</b>	
	<b>Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu</b>		<b>Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu</b>	
	<b>Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik</b>		<b>Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik</b>	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</i>	<i>1 Paket</i>

	<i>Jumlah pakaian olah raga yang tersedia</i>			
		<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/LHKPN, KP4)</i>
<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal</i>	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>31 Orang (17 Laki-laki dan 14 Perempuan)</i>
	<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan</b>	<b>100%</b>
			<b>Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi</b>	<b>3 Layanan</b>
<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang tertangani</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>
		<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>

		<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>
			<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<i>100%</i>
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
		<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>
	<i>Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan</i>			
	<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>			
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>

	<b>Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi</b>			
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Layanan Jasa Administrasi Persuratan yang Tertangani</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Dokumen</i>
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Dokumen</i>
	<i>Jumlah layanan updating pengaduan masyarakat yang tertangani</i>			
	<i>Jumlah layanan updating website yang tertangani</i>			
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Dokumen</i>
	<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>

<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>4 Unit Mobil, 3 Unit Motor</i>
<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>40 Unit</i>
<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah gedung kantor yang dipelihara</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>1 Unit</i>
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		
	<b>Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi yang baik</b>		<b>Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi yang baik</b>	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang tertata dengan Baik</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang tertata dengan Baik</b>	
<i>Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang batasnya ditetapkan</i>	<i>Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</i>	<i>4 Desa</i>
	<i>Jumlah Desa/Lingkungan yang dimekarkan</i>			

<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang Tertata Wilayahnya</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya</i>	2 Desa
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		
	<b>Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel</b>		<b>Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel</b>	
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel</b>	
	<b>Persentase Laporan Aset Desa yang Akuntabel</b>		<b>Persentase Laporan Aset Desa yang Akuntabel</b>	
	<b>Persentase Desa yang melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sesuai Ketentuan</b>		<b>Persentase Desa yang melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sesuai Ketentuan</b>	
	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa dan BPD</b>		<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa dan BPD</b>	
	<b>Persentase peserta bimbingan dan Pelatihan Aparatur desa yang bernilai baik</b>		<b>Persentase peserta bimbingan dan Pelatihan Aparatur desa yang bernilai baik</b>	
	<b>Persentase Desa/ Kelurahan yang telah mengentry profil secara lengkap dan up to date</b>		<b>Persentase Desa/ Kelurahan yang telah mengentry profil secara lengkap dan up to date</b>	
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	<i>Jumlah juklak dan juknis pengelolaan keuangan desa</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa</i>	2 Dokumen

<i>Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</i>	<i>Jumlah aparatur desa yang mengikuti bimbingan</i>	<i>Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</i>	<i>Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>	62 Orang
<i>Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa</i>	<i>Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi</i>	<i>Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa</i>	62 Dokumen
<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Sosialisasi Pilkades</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>	18 Laporan
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</i>	<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang menyusun profil desa/kelurahan</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Profil Desa</i>	81 Dokumen
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang dibina pengelolaan asetnya</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa</i>	31 Dokumen
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD</i>	<i>Jumlah anggota BPD yang dibina</i>	<i>Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD</i>	<i>Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>	62 Orang
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Desa/Kelurahan Terbaik</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	8 Dokumen
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		
	<b>Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif</b>		<b>Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif</b>	

<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan</b>	<b>Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh Masyarakat</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan</b>	<b>Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh Masyarakat</b>	
<b>Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sarjana Membangun Desa yang aktif</b>	<b>Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sarjana Membangun Desa yang aktif</b>	
	<b>Persentase Kelembagaan Masyarakat yang dibina</b>		<b>Persentase Kelembagaan Masyarakat yang dibina</b>	
	<b>Persentase PKK Desa/Kelurahan yang aktif</b>		<b>Persentase PKK Desa/Kelurahan yang aktif</b>	
	<b>Persentase BUMDesa yang aktif</b>		<b>Persentase BUMDesa yang aktif</b>	
	<b>Jumlah Desa yang memiliki unit Usaha Bersama</b>		<b>Jumlah Desa yang memiliki unit Usaha Bersama</b>	
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	62 Dokumen

<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Jumlah Sarjana Membangun Desa (SMD)</i>	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	1 Lembaga
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	<i>Jumlah Pembinaan Unit Usaha Bersama</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	62 Dokumen
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	<i>Jumlah TTG (Teknologi Tepat Guna) yang dilombakan</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	3 Laporan
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	<i>Jumlah BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat)</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	1 Laporan
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah Pembinaan PKK Desa/Kelurahan yang dilaksanakan</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	81 Dokumen

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat desa, kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota/kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten.

Untuk perencanaan tahun 2023 tidak ada usulan masyarakat yang disampaikan ke Dinas Pemdes sehingga tidak adanya penelaahan atas usulan masyarakat baik berupa program, kegiatan, ataupun sub kegiatan.

Usulan	Program	Kegiatan
1.		
2.	<i><u>NIHIL</u></i>	
3.		

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

##### **Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional)**

**Prioritas 1: Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**

##### **Program Prioritas :**

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Peningkatan Ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
4. Peningkatan Pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
6. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan investasi disektor riil dan industrialisasi
7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

**Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

##### **Program Prioritas :**

1. Pembangunan Wilayah Sumatera
2. Pembangunan Wilayah Jawa - Bali
3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
4. Pembangunan Wilayah Kalimantan
5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Pembangunan Wilayah Maluku
7. Pembangunan Wilayah Papua

**Prioritas 3 : Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

##### **Program Prioritas :**

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Nasional Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
6. Pengentasan Kemiskinan

## 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

### **Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

#### **Program Prioritas :**

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Meperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

### **Prioritas 5 : Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar**

#### **Program Prioritas :**

1. Infrastruktur pelayanan dasar;
2. Infrastruktur Ekonomi;
3. Infrastruktur Perkotaan;
4. Energi dan Ketenagalistrikan
5. Transformasi digital;

### **Prioritas 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim**

#### **Program Prioritas :**

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.; dan
3. Pembangunan rendah karbon.

### **Prioritas 7 : Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**

#### **Program Prioritas :**

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
5. Menjaga stabilitas keamanan Nasional.

Di tingkat Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan tema pembangunan tahun 2023 sebagai pelaksanaan tahun terakhir RPJMD tahun 2019-2023 yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi Menuju Sumber Daya Manusia yang Berkualitas“ dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka pada tahun 2023 adalah:

1. Pembangunan Pariwisata, Pertanian, Industri dan UMKM
2. Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang

Berkeadilan

3. Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur Akses Perekonomian

4. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

5. Penanggulangan Bencana

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa berusaha untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dengan cara lebih memperluas jangkauan penguatan ekonomi Desa melalui Badan Usaha Desa yang telah terbentuk maupun belum terbentuk sehingga diharapkan dapat segera mempercepat pemulihan ekonomi untuk Desa tersebut. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka adalah Meningkatkan Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah dan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pemerintahan yang akuntabel sedangkan sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa, Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah selaras dengan prioritas daerah Pembangunan Pariwisata, Pertanian, Industri dan UMKM serta dengan Prioritas Nasional Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sesuai dengan tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan menunjukkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun Tujuan dan sasaran Renja 2023 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Bangka**  
**Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai AKIP	28,15
2	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang (Permendagri 81/2015)	72,58

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dijabarkan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 4 Program, 10 Kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan dengan Rincian pada Tabel Berikut :

**Tabel 3.2**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2023**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1	2	3
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
2,13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah
<b>2.13.01.2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar</b>
		<b>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</b>
<i>2.13.01.2.01.01</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun</i>
<i>2.13.01.2.01.06</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah laporan kinerja yang disusun</i>
		<b>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI</b>
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar</b>
		<b>Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar</b>
<i>2.13.01.2.02.01</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani</i>
		<i>Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun</i>
		<b>Indeks Profesionalisme Aparatur</b>
<b>2.13.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi</b>
		<b>Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu</b>
		<b>Persentase aparatur yang berkinerja baik</b>
<i>2.13.01.2.05.02</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia</i>
		<i>Jumlah pakaian olah raga yang tersedia</i>
<i>2.13.01.2.05.09</i>	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal</i>
		<b>Indeks Sarana dan Prasarana</b>
		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>
<i>2.13.01.2.06.09</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani</i>
		<i>Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman kantor yang tertangani</i>
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>

2.13.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan
2.13.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan</b>
		<b>Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi</b>
2.13.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani
2.13.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani
2.13.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara
2.13.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
2.13.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi
		<b>Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi yang baik</b>
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang tertata dengan Baik</b>
2.13.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang batasnya ditetapkan
		Jumlah Desa/Lingkungan yang dimekarkan
2.13.02.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Tertata Wilayahnya
		<b>Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel</b>
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel</b>
		<b>Persentase Laporan Aset Desa yang Akuntabel</b>
		<b>Persentase Desa yang melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sesuai Ketentuan</b>
		<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa dan BPD</b>
		<b>Persentase peserta bimbingan dan Pelatihan Aparatur desa yang bernilai baik</b>
		<b>Persentase Desa/ Kelurahan yang telah mengentry profil secara lengkap dan up to date</b>
2.13.04.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah juklak dan juknis pengelolaan keuangan desa
2.13.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti bimbingan
2.13.04.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi
2.13.04.2.01.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Sosialisasi Pilkades
2.13.04.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyusun profil desa/kelurahan
2.13.04.2.01.13	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dibina pengelolaan asetnya
2.13.04.2.01.14	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang dibina
2.13.04.2.01.18	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Terbaik
		<b>Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif</b>

2.13.05.2.01	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh Masyarakat</b>
		<b>Persentase Sarjana Membangun Desa yang aktif</b>
		<b>Persentase Kelembagaan Masyarakat yang dibina</b>
		<b>Persentase PKK Desa/Kelurahan yang aktif</b>
		<b>Persentase BUMDesa yang aktif</b>
		<b>Jumlah Desa yang memiliki unit Usaha Bersama</b>
2.13.05.2.01.02	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat</i>
2.13.05.2.01.03	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Jumlah Sarjana Membangun Desa (SMD)</i>
2.13.05.2.01.05	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	<i>Jumlah Pembinaan Unit Usaha Bersama</i>
2.13.05.2.01.06	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	<i>Jumlah TTG (Teknologi Tepat Guna) yang dilombakan</i>
2.13.05.2.01.07	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	<i>Jumlah BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat)</i>
2.13.05.2.01.09	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah Pembinaan PKK Desa/Kelurahan yang dilaksanakan</i>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka telah menyusun Anggaran yang dibutuhkan pada Tahun Anggaran 2023 serta Perkiraan Maju pada Tahun 2024 yang telah disajikan pada table Rencana Kegiatan Perangkat Daerah berikut ini :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
KABUPATEN BANGKA**

**OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.178.742.418,00				5.299.992.040,00
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		28,15				28,30	
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		11,50				13,00	
2.13.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Kab. Bangka	100%	94.485.465,00			100%	43.136.000,00
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%				100%	
2.13.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Kab. Bangka	6 Dokumen	38.393.500,00	Dana Alokasi Umum	P1	6 Dokumen	7.740.500,00
2.13.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab. Bangka	5 Dokumen	13.754.335,00	Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	6.230.000,00

2.13.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen	6.952.650,00	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	4.420.000,00
2.13.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen	7.187.160,00	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.175.000,00
2.13.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen	7.043.345,00	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	4.225.000,00
2.13.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	4 Laporan	7.388.100,00	Dana Alokasi Umum		4 Laporan	7.913.500,00
2.13.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	8 Laporan	13.766.375,00	Dana Alokasi Umum		8 Laporan	7.432.000,00
		<b>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI</b>		<b>0%</b>				<b>0%</b>	
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100%</b>	<b>3.718.812.495,00</b>			<b>100%</b>	<b>4.384.415.240,00</b>
		<b>Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
2.13.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	26 Orang/bulan	3.606.598.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	26 Orang/bulan	4.288.335.240,00

2.13.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	12 Dokumen	56.834.280,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	37.360.000,00
2.13.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka	2 Laporan	21.843.800,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Laporan	29.360.000,00
2.13.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka	40 Laporan	33.536.415,00	Dana Alokasi Umum	P1	40 Laporan	29.360.000,00
		<b>Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah</b>		<b>65,33</b>				<b>65,53</b>	
2.13.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi</b>	Kab. Bangka	<b>10%</b>	99.336.240,00			<b>10%</b>	122.610.000,00
		<b>Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
		<b>Persentase aparatur yang berkinerja baik</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
2.13.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bangka	1 Paket	9.800.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Paket	46.750.000,00
2.13.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka dan Luar Daerah	11 Dokumen	89.536.240,00	Dana Alokasi Umum	P1	11 Dokumen	34.360.000,00

2.13.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bangka dan Luar Daerah	5 Orang	-	Dana Alokasi Umum	P1	5 Orang	41.500.000,00
		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>		<b>0,80</b>				<b>1,00</b>	
2.13.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100%</b>	<b>356.121.838,00</b>			<b>100%</b>	<b>154.407.500,00</b>
		<b>Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi</b>		<b>3 Layanan</b>				<b>3 Layanan</b>	
2.13.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Laporan	240.090.184,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	86.687.500,00
2.13.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Dokumen	86.183.724,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	33.360.000,00
2.13.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Dokumen	29.847.930,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	34.360.000,00
		<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
2.13.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100%</b>	<b>662.809.240,00</b>			<b>100%</b>	<b>390.805.000,00</b>
2.13.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	12 Laporan	475.775.385,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	198.640.000,00
2.13.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka	12 Laporan	79.059.765,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	133.190.000,00

2.13.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	107.974.090,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	58.975.000,00
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100%</b>	<b>247.177.140,00</b>			<b>100%</b>	<b>204.618.300,00</b>
2.13.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangka	8 Unit	200.807.140,00	Dana Alokasi Umum	P1	8 Unit	128.618.300,00
2.13.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bangka	22 Unit	30.920.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	22 Unit	37.000.000,00
2.13.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangka	1 Unit	15.450.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Unit	39.000.000,00
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>				<b>139.349.350,00</b>				<b>184.736.959,00</b>
		<b>Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi yang baik</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang tertata dengan Baik</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100%</b>	<b>139.349.350,00</b>			<b>100%</b>	<b>184.736.959,00</b>
2.13.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Bangka	4 Desa	107.350.010,00	Dana Alokasi Umum	P1	4 Desa	127.354.248,00
2.13.02.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kab. Bangka	2 Desa	31.999.340,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Desa	57.382.711,00
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI</b>								

PEMERINTAHAN DESA				100%	1.788.557.088,00			100%	1.273.462.383,00
		<b>Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel</b>		100%				100%	
2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel	Kab. Bangka	100%	1.788.557.088,00			100%	1.273.462.383,00
		Persentase Laporan Aset Desa yang Akuntabel		50,00%				50,00%	
		Persentase Desa yang melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sesuai Ketentuan		100%				100,00%	
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa dan BPD		100%				100%	
		Persentase peserta bimbingan dan Pelatihan Aparatur desa yang bernilai baik		50,00%				100%	
		Persentase Desa/ Kelurahan yang telah mengentry profil secara lengkap dan up to date		100%				100%	
2.13.04.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Bangka	2 Dokumen	1.290.680.998,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen	270.000.000,00
2.13.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Bangka	62 Orang	24.989.295,00	Dana Alokasi Umum	P1	62 Orang	182.892.000,00
2.13.04.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan	Kab. Bangka	62 Dokumen	58.882.000,00	Dana Alokasi	P1	62 Dokumen	170.000.000,00

		<i>Pengawasan Peraturan Desa</i>				<i>Umum</i>			
2.13.04.2.01.09	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>18 Laporan</i>	<i>214.317.140,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>18 Laporan</i>	<i>230.000.000,00</i>
2.13.04.2.01.11	<i>Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>81 Dokumen</i>	<i>19.998.790,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>81 Dokumen</i>	<i>69.235.700,00</i>
2.13.04.2.01.13	<i>Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>31 Dokumen</i>	<i>57.688.865,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>31 Dokumen</i>	<i>87.005.630,00</i>
2.13.04.2.01.14	<i>Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD</i>	<i>Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>62 Orang</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>62 Orang</i>	<i>127.707.053,00</i>
2.13.04.2.01.18	<i>Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>72.000.000,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>136.622.000,00</i>
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>				<b>3.081.135.644,00</b>				<b>4.611.593.207,00</b>
		<b>Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan oleh Masyarakat</b>	<b>Kab. Bangka</b>	<b>100%</b>	<b>3.081.135.644,00</b>			<b>100%</b>	<b>4.611.593.207,00</b>
		<b>Persentase Sarjana Membangun Desa yang aktif</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
		<b>Persentase</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	

	yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Masyarakat yang dibangun									
		Persentase PKK Desa/Kelurahan yang aktif								100%	100%
		Persentase BUMDesa yang aktif								100%	100%
		Jumlah Desa yang memiliki unit Usaha Bersama								62 Desa	62 Desa
2.13.05.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bangka	62 Dokumen	36.628.580,00	Dana Alokasi Umum	P1	62 Dokumen	110.186.800,00		
2.13.05.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bangka	1 Lembaga	2.019.740.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Lembaga	2.141.821.305,00		
2.13.05.2.01.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Bangka	62 Dokumen	144.314.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	62 Dokumen	196.473.972,00		
2.13.05.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil	Kab. Bangka	3 Laporan		Dana	P1	3 Kali			

	<i>Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	<i>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>			<i>80.453.064,00</i>	<i>Alokasi Umum</i>			<i>155.674.820,00</i>
<i>2.13.05.2.01.07</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>-</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>141.654.000,00</i>
<i>2.13.05.2.01.09</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>81 Dokumen</i>	<i>800.000.000,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>81 Dokumen</i>	<i>1.865.782.310,00</i>
<b>JUMLAH</b>					<b>10.187.784.500,00</b>				<b>11.369.784.589,00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat penting dan harus dilaksanakan sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan dalam bentuk rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pemerintah dalam bidang pemberdayaan, mengadopsi kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berbasis masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk : a. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2023; b. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2023; c. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana kebijakan dimasa mendatang oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Sungailiat, Agustus 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Bangka,

Drs. M. Dalyan Amrie  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670427 198603 1 002